

**Komunikasi Partisipatif pada Kegiatan Optimalisasi  
Pemanfaatan Lahan Pekarangan di Kecamatan Kajoran  
Kabupaten Magelang**

**Febri Palupi Muslikhah<sup>1</sup>, Sarwititi Sarwoprasodjo<sup>2</sup>,  
Dwi Sadono<sup>3</sup>**

<sup>1</sup> Institut Agama Islam Sahid

<sup>2,3</sup> Institut Pertanian Bogor

[febripalupimuslikhah@gmail.com](mailto:febripalupimuslikhah@gmail.com), [sarwititi@gmail.com](mailto:sarwititi@gmail.com)  
[d\\_sadono@yahoo.com](mailto:d_sadono@yahoo.com)

Abstrak

Keberhasilan program pembangunan pertanian tidak lepas dari partisipasi aktif petani yang diwujudkan dalam bentuk respon. Respon tersebut disampaikan dalam bentuk ide, kritik, dialog dan aksi refleksi. Kelompok Wanita Tani (KWT) yang menjadi pelaku utama dalam program optimalisasi pemanfaatan lahan pekarangan merupakan penentu keberhasilan ketahanan pangan di tingkat keluarga. Penyuluh pendamping menjadi tumpuan harapan pemerintah sebagai fasilitator pembangunan yang mampu memfasilitasi dan mengedukasi KWT sehingga mampu merespon program pembangunan yang dijalankan. Artikel ini bertujuan untuk mendeskripsikan karakteristik kelompok, peran penyuluh pendamping, komunikasi partisipatif KWT dan menganalisis hubungan antara karakteristik kelompok dan peran penyuluh pendamping dengan komunikasi partisipatif. Penelitian ini didesain sebagai penelitian survei yang bersifat deskriptif korelasional. Pemilihan responden diambil secara sensus sebanyak 12 KWT. Data yang telah dikumpulkan kemudian dianalisis menggunakan uji korelasi *rank Spearman*. Hasil yang diperoleh dari uji korelasi adalah terdapat hubungan positif yang sangat nyata antara karakteristik kelompok, peran penyuluh pendamping dengan komunikasi partisipatif KWT.

Kata kunci : komunikasi partisipatif, kelompok wanita tani, pemanfaatan pekarangan

**Pendahuluan**

Ketahanan pangan masih menjadi masalah yang menjadi perhatian utama di Indonesia. Hal tersebut dikarenakan jumlah penduduk yang mengalami kerawanan pangan terus meningkat tiap tahunnya. Di tengah keberhasilan pemerintah menekan angka kemiskinan hingga 4,09 persen pertahun dari tahun 2009 hingga 2013, jumlah penduduk yang mengalami rawan pangan justru semakin meningkat. Selama kurun waktu 5 tahun terakhir, jumlah penduduk Indonesia yang mengalami rawan pangan bertambah hingga 2,12 persen per tahun dan jumlah penduduk sangat rawan pangan mengalami peningkatan mencapai 4,81 persen per tahun (Badan Ketahanan Pangan 2013). Menanggapi masalah tersebut, Pemerintah berusaha untuk meningkatkan ketahanan pangan nasional melalui perbaikan ketersediaan pangan rumah tangga. Hal tersebut ditempuh karena kestabilan ketahanan pangan rumah tangga merupakan landasan bagi ketahanan pangan masyarakat, yang selanjutnya menjadi pilar bagi ketahanan pangan di tingkat Daerah dan Nasional (Dewan Ketahanan Pangan 2006).

Keseriusan pemerintah dibuktikan melalui program pembangunan yang diprakarsai oleh Badan Ketahanan Pangan dengan membentuk program pemberdayaan kelembagaan perempuan yaitu Percepatan Penganekaragaman Konsumsi Pangan (P2KP) melalui kegiatan Optimalisasi Pemanfaatan Pekarangan. Program tersebut diharapkan mampu meningkatkan pola konsumsi rumah tangga yang beragam, bergizi, seimbang dan aman, sehingga mampu mewujudkan ketahanan pangan rumah tangga. Hasil penelitian Ashari et al (2012), Saptana et al (2011), Novitasari (2011) dan Sajogyo (1994) menyatakan bahwa pekarangan memiliki potensi dalam penyediaan pangan keluarga, mengurangi pengeluaran rumah tangga untuk pembelian pangan, meningkatkan pendapatan rumah tangga petani, meningkatkan keragaman pangan keluarga, merangsang tumbuhnya ekonomi produktif di pedesaan dan juga sebagai lumbung hidup, apotik hidup serta warung hidup.

Ashari et al (2012) dalam penelitiannya mengenai perkembangan pemanfaatan pekarangan di Indonesia menegaskan bahwa program pembangunan yang berkomitmen untuk meningkatkan ketahanan pangan perlu dilakukan melalui pendekatan kelompok secara partisipatif. Terbentuknya kelompok akan membantu menumbuhkan kekuatan dengan prinsip keserasian dan kepemimpinan dari peserta program. Langkah yang ditempuh untuk bisa melibatkan partisipasi aktif anggota kelompok dalam program pembangunan adalah dengan menggunakan pendekatan komunikasi yang memungkinkan anggota kelompok memiliki kemampuan untuk memecahkan masalahnya sendiri, bebas berpendapat, berekspresi dan mengungkapkan diri secara terbuka satu sama lainnya (Sulistiyowati et al 2005). Pendekatan komunikasi tersebut merupakan salah satu bentuk dari komunikasi pembangunan yaitu komunikasi partisipatif. Komunikasi partisipatif dalam pembangunan bermakna komunikasi pada tingkat "akar rumput", yaitu komunikasi yang melibatkan partisipasi dari keseluruhan masyarakat dalam program pembangunan (Nair dan White 2004); (Bessette 2007).

Prinsip dasar dari komunikasi partisipatif adalah adanya *dialogue*, *voice*, *liberating pedagogy* dan *action-reflection-action* (Tufte dan Mefalopulos 2009). Dialog memungkinkan anggota kelompok, *changes agent* dan stakeholder terkait melakukan proses komunikasi dua arah secara berkelanjutan sehingga ditemukan suatu pemahaman yang membentuk kesadaran akan permasalahan dari kebutuhan yang mereka rasakan. Bisa dikatakan bahwa proses komunikasi partisipatif lebih menekankan pada kemampuan anggota kelompok agar mampu merespon program pembangunan yang diikutinya melalui keberanian menyampaikan aspirasi

serta berbagi informasi, sehingga mampu memicu timbulnya *collective action* (Warnock et al 2007); (Rahim 2004).

*Change agent* merupakan komunikator pembangunan dalam komunikasi partisipatif yang berperan untuk mengartikulasi dan menjembatani aspirasi dan dialog anggota komunitas. Mereka dilatih agar mampu memfasilitasi kebutuhan sasaran melalui dialog, pembelajaran dan perubahan. Ketrampilan dalam bertindak sebagai *change agent* tidak datang secara otomatis, tetapi harus berlatih dan belajar untuk mendengarkan orang lain, membantu sasaran untuk mengungkapkan pandangannya dan mendampingi mereka membangun konsensus untuk bertindak secara kolektif. Tugas utama mereka adalah mengenalkan ide serta menjadi fasilitator yang membantu memenuhi kebutuhan masyarakat. (Bessete 2007); (Chitnis (2005); (Nair dan White 2004).

Peran komunikator pembangunan sebagai fasilitator dalam proses pemberdayaan masyarakat terbagi dalam beberapa hal diantaranya adalah peran fasilitatif dan peran edukatif. Peran fasilitatif meliputi kemampuan mengembangkan partisipasi, mediasi dan negosiasi, memberikan support, membangun konsensus, memfasilitasi kelompok, memanfaatkan ketrampilan dan sumberdaya. Peran edukatif dalam konteks ini mensyaratkan fasilitator untuk berperan aktif dalam proses pendidikan guna merangsang dan mendukung kegiatan-kegiatan kelompok. Peran edukatif meliputi kemampuan menumbuhkan kesadaran, memotivasi, memberikan informasi dan pelatihan (Ife 1995).

Penelitian mengenai komunikasi partisipatif selama ini lebih banyak fokus pada program pemerintah (Hadiyanto 2009); (Muchlis 2009); (Mulyasari 2009); (Satriani 2011); (Saputra; 2011) dan (Kusumadinata 2012), di mana menurut penelitian Waisbord (2008) program yang berasal dari lembaga pemerintahan lebih bersifat informatif ketimbang komunikasi partisipatif, hal tersebut diakibatkan oleh adanya birokrasi yang melemahkan penggunaan komunikasi partisipatif pada program pemerintah. Dari segi obyek penelitian, kebanyakan penelitian terdahulu melihat aktivitas komunikasi partisipatif dari fasilitatornya, ada juga yang fokus pada anggota komunitas, seperti pada penelitian (Muchlis 2009); (Mulyasari 2009); (Satriani 2011); (Saputra; 2011) dan (Kusumadinata 2012), belum ada yang meneliti aktifitas komunikasi partisipatif dalam kelompok, sehingga bisa diketahui bagaimana aktifitas komunikasi partisipatif antara beberapa kelompok yang melaksanakan kegiatan pembangunan. Penelitian mengenai komunikasi partisipatif selama ini cenderung memisahkan konsep-konsep yang melekat pada komunikasi partisipatif (*voice, dialogue, liberating pedagogy*), referensi penelitian terdahulu belum ditemukan penelitian yang melihat komunikasi partisipatif secara utuh tanpa memisahkan konsep-konsep yang melekat dalam komunikasi partisipatif.

Sejauh ini belum banyak penelitian komunikasi partisipatif yang menjadikan kelompok sebagai obyek penelitian dan melihat komunikasi partisipatif secara utuh tanpa memisahkan konsep-konsep yang melekat di dalamnya. Sama halnya dengan subyek penelitian yang selama ini banyak meneliti program dari lembaga pemerintah saja, belum banyak yang mencoba melihat komunikasi partisipatif dari kelompok swadaya bentukan masyarakat sendiri. Penelitian ini mencoba melihat komunikasi partisipatif secara utuh dari kelompok yang menjalankan kegiatan pemanfaatan pekarangan baik dari kelompok yang didanai oleh lembaga pemerintah maupun kelompok swadaya. Berdasarkan hal tersebut, artikel ini bertujuan untuk (1) mendeskripsikan karakteristik kelompok, peran penyuluh pendamping dan komunikasi

partisipatif kelompok, (2) menganalisis hubungan karakteristik kelompok dan peran penyuluh pendamping dengan komunikasi partisipatif.

## Metode Penelitian

Penelitian dilaksanakan di Kecamatan Kajoran Kabupaten Magelang. Populasi penelitian merupakan seluruh Kelompok Wanita Tani (KWT) yang melaksanakan program optimalisasi pemanfaatan lahan pekarangan di Kecamatan Kajoran Kabupaten Magelang. Sampel dalam penelitian ini diambil dari 3 pengurus kelompok di tiap kelompok, sehingga didapatkan sampel sebanyak 36 pengurus kelompok. Penelitian ini didesain sebagai penelitian survei yang bersifat deskriptif korelasional. Menurut Singarimbun (1995) desain penelitian survei merupakan penelitian yang mengambil contoh dari populasi dan menggunakan kuesioner sebagai alat pengumpulan data primer dan sekunder. Data yang dikumpulkan berupa data kuantitatif. Data kuantitatif meliputi; (1) Informasi mengenai komunikasi partisipatif yang berlangsung dalam KWT, (2) umur kelompok, pengalaman kelompok serta luas lahan, (3) peran penyuluh pendamping dalam mendampingi KWT yang berupa peran fasilitatif dan peran edukatif. Di samping data kuantitatif, peneliti juga melakukan wawancara mendalam ke pada beberapa anggota KWT yang memiliki pengetahuan secara lengkap mengenai aktivitas KWT untuk menambah informasi penelitian. Instrumen yang digunakan berupa kuesioner dan pedoman wawancara. Analisis korelasi dalam penelitian ini menggunakan uji korelasi *Rank Spearman* ( $r_s$ ). Korelasi *Rank Spearman* digunakan untuk menguji hipotesis mengenai hubungan peubah bebas dengan peubah terikat. Melalui analisis tersebut bisa dilihat hubungan antara peubah yang diteliti (Kriyantono 2010).

## Hasil dan Pembahasan

### 1. Peran penyuluh Pendamping

Keberhasilan kegiatan pemanfaatan pekarangan di Kecamatan Kajoran tidak lepas dari peran penyuluh pendamping dari BPPK Kajoran. Penyuluh pendamping membantu memfasilitasi kebutuhan KWT serta memberikan pengetahuan yang dibutuhkan oleh anggota KWT melalui peran fasilitatif dan peran edukatif. Persentase peran penyuluh yang dirasakan oleh KWT di Kecamatan Kajoran tersaji di tabel 2 berikut ini.

Tabel 2. Jumlah dan persentase peran penyuluh pendamping

Peran penyuluh pendamping	Jumlah	persen
Peran fasilitatif		
(tinggi)	3	25
(sedang)	5	41,67
(rendah)	4	33,33
Jumlah	12	100
Peran edukatif		
(tinggi)	4	33,33
(sedang)	6	50
(rendah)	2	16,67
Jumlah	12	100

Peran penyuluh pendamping dalam membantu memfasilitasi dan mengedukasi KWT termasuk dalam kategori yang cukup bagus, di mana peran fasilitatif masuk dalam kategori sedang dan peran edukatif tergolong tinggi menurut KWT.

### Peran Fasilitatif

Peran fasilitatif dalam penelitian ini meliputi kemampuan penyuluh pendamping dalam membangun hubungan dengan kelompok, memfasilitasi kegiatan musyawarah, memfasilitasi pengajuan dana bantuan, mendatangkan tenaga terampil ahli dalam bidang tertentu untuk memberikan pelatihan kepada KWT, memberikan informasi mengenai bibit yang dibutuhkan KWT, serta membantu mediasi ketika terjadi konflik dalam KWT. Kemampuan penyuluh pendamping dalam memfasilitasi KWT, memicu keaktifan KWT dalam berkomunikasi. Penyuluh pendamping mendorong KWT untuk bisa mengutarakan kebutuhan dan menganalisis masalahnya masing-masing, sehingga penyuluh bisa membantu memfasilitasi sesuai dengan kebutuhan KWT. Peran fasilitatif yang dijalankan oleh penyuluh pendamping bisa terlaksana dengan baik akibat dari usaha penyuluh dalam membangun hubungan dan kepercayaan dengan anggota KWT. Ketidakmampuan penyuluh dalam membangun hubungan yang dikarenakan jarang mengunjungi kelompok sasaran memperbesar peluang kegagalan program. Hal tersebut disajikan secara jelas dalam beberapa referensi penelitian terdahulu (Chitnis 2005); (Muchlis 2009); (Satriani 2011); (Saputra 2011) dan (Kusumadinata 2012).

Penyuluh pendamping di Kecamatan Kajoran membangun hubungan dengan kunjungan rutin, serta selalu melibatkan dirinya dalam setiap kegiatan di daerah KWT binaan. Bahkan penyuluh pendamping tidak segan untuk memberikan sumbangan baik itu berupa materi maupun tenaga. Seperti pada saat acara perlombaan desa, pembuatan laboratorium lapang, hajatan, mengunjungi anggota KWT yang sakit hingga melayat ketika ada salah satu anggota keluarga KWT yang meninggal dunia. Hubungan baik yang berhasil dibangun oleh penyuluh pendamping tersebut menimbulkan kepercayaan di pihak anggota KWT dan mampu meningkatkan kredibilitas penyuluh di mata anggota KWT (Chitnis 2005); (Satriani 2011); (Saputra 2011) dan (Kusumadinata 2012).

Salah satu ciri bahwa anggota kelompok mulai terbangun rasa percaya diri untuk aktif terlibat dalam setiap aktifitas komunikasi adalah dengan meningkatnya *self efficacy*. *Self efficacy* merupakan persepsi atas kemampuan mengerjakan sesuatu yang dimiliki oleh anggota (Chitnis 2005). Kelompok yang tingkat *self efficacy*nya rendah, cenderung malu untuk berpartisipasi dalam setiap kegiatan komunikasi, karena mereka merasa tidak mempunyai kemampuan untuk bertukar gagasan dalam bermusyawarah (Muchlis 2009). *Self efficacy* bisa terbentuk karena adanya diskusi yang melibatkan anggota KWT dan menghargai setiap gagasan yang disampaikan oleh anggota KWT. Penyuluh pendamping dalam hal ini telah mampu mendorong anggota untuk meningkatkan *self efficacy* nya melalui diskusi ringan ketika di luar pertemuan ataupun di saat pertemuan.

### **Peran Edukatif**

Peran edukatif yang dilakukan oleh penyuluh meliputi penyampaian materi pada saat sosialisasi, memberikan pelatihan baik itu mengenai penanaman, perawatan, pemupukan maupun pengolahan pangan, hingga kemampuan penyuluh dalam menjawab pertanyaan anggota KWT. Hubungan positif yang nyata ini disebabkan karena penyuluh pendamping telah memahami materi mengenai penanaman, perawatan, pemupukan dan pengolahan dengan sangat baik, sehingga mereka bisa menyampaikan materi dengan jelas dan mampu menjawab ketika ada anggota KWT bertanya.

Hal lainnya yang membuat peran edukatif penyuluh bisa berjalan dengan sangat baik adalah materi yang dibawa penyuluh selalu disesuaikan dengan potensi dan kondisi

wilayah KWT binaan (Melkote dan Vallath 2004); (Chitnis 2005). Di awal kegiatan, penyuluh telah lebih dulu menggali informasi melalui diskusi dengan anggota KWT untuk mendata tanaman sayuran apa saja yang cocok dibudidayakan di pekarangan, kendala yang kemungkinan terjadi di wilayah, komoditas unggulan di wilayah KWT dan potensi wilayah. Sama halnya dengan pelatihan yang selama ini diberikan oleh penyuluh pendamping. Materi pelatihan berasal dari sumberdaya lokal yang melimpah di wilayah KWT seperti ubi jalar, umbi kerot, pisang hingga gula merah yang kemudian menjadi bahan baku pembuatan makanan olahan yang lebih modern.

Kemampuan penyuluh dalam membangun hubungan dengan anggota KWT menjadi kunci keberhasilan penyuluh dalam menjalankan perannya (Besette 2007); (Chitnis 2005). Anggota sudah terbiasa bertemu penyuluh, berbincang-bincang baik itu masalah pekarangan maupun sekedar bercanda. Tidak ada sekat yang mengkotak-kotakkan antara penyuluh dan anggota KWT. Penyuluh pendamping di Kecamatan Kajoran memosisikan dirinya sama dengan anggota KWT. Menurut penelitian Saputra (2011), pendampingan yang menggunakan prinsip egaliter atau kesederajatan kedudukan akan membuat hubungan yang terjalin antara fasilitator dan masyarakat menjadi akrab.

Sementara itu berdasarkan hasil penelitian, sebanyak enam KWT beranggapan penyuluh pendamping berperan besar dalam mengedukasi KWT. KWT menganggap penyuluh mampu memberikan pengetahuan serta informasi yang dibutuhkan, beberapa peran edukatif yang dianggap sangat membantu KWT adalah pemberian informasi sekaligus pelatihan mengenai penanaman, perawatan, pemupukan hingga pengolahan pangan, kemampuan penyuluh memberikan pelatihan yang disesuaikan dengan sumberdaya dan kondisi lingkungan KWT, dan kemampuan penyuluh dalam membantu menjawab pertanyaan anggota. Keberhasilan Penyuluh dalam menjalankan peran edukatifnya tidak terlepas dari keaktifan penyuluh melakukan pendekatan dan diskusi dengan anggota KWT untuk mengidentifikasi kebutuhan dan permasalahan yang dirasakan anggota KWT serta menggabungkan antara pengetahuan lokal masyarakat dengan pengetahuan modern yang dimiliki penyuluh (Besette 2007 ; Melkote dan Vallath 2004). Salah satu pelatihan yang merujuk berdasarkan kesediaan sumberdaya lingkungan adalah pelatihan pembuatan eggroll dengan bahan baku lokal tepung garut atau biasa disebut *kerut* dalam bahasa Jawa. Hasil dari pelatihan ternyata mampu menumbuhkan semangat industri rumah tangga bagi anggota KWT, anggota KWT yang dulunya hanya mengolah umbi garut/kerut dengan merebus atau dibuat jenang kini sudah bisa mengolahnya secara lebih modern dan telah menjadi mata pencaharian utama para ibu rumah tangga, terutama di Desa Krumpakan.

Kendala yang kadang menghambat peran penyuluh adalah kurangnya tenaga penyuluh, terkadang satu penyuluh harus memegang dua KWT binaan, sehingga kegiatan untuk mengedukasi dan memfasilitasi kebutuhan anggota tertunda karena masih membantu memfasilitasi KWT binaan yang lainnya.

## 2. Komunikasi Partisipatif

Kelompok Wanita Tani (KWT) pelaksana Kegiatan Optimalisasi Pemanfaatan Pekarangan termasuk aktif dalam melakukan berkomunikasi baik dengan sesama kelompok, penyuluh pendamping hingga tamu yang berkunjung ke KWT. Berkat adanya kelompok mereka terlatih untuk melakukan diskusi di setiap pertemuan, menyampaikan gagasan mengenai apa yang dibutuhkan dan masalah yang sedang dirasakan untuk mencari

jalan keluarnya serta melakukan tindakan kolektif dengan sesama anggota kelompok. Adapun jumlah dan presentasi keaktifan komunikasi partisipatif yang terjadi di KWT Kajoran tercantum dalam tabel 3:

Tabel 1. Jumlah dan persentase komunikasi partisipatif

Komunikasi Partisipatif	jumlah	persen
tinggi	5	41,67
sedang	5	41,67
rendah	2	16,66
Jumlah	12	100

Berdasarkan data yang ditunjukkan oleh Tabel 3, bisa dikatakan bahwa aktifitas komunikasi partisipatif di Kecamatan Kajoran tergolong baik, di mana 5 KWT mengkategorikan tinggi sedangkan yang 5 lainnya menggolongkannya dalam kategori sedang dan sisanya menyatakan komunikasi partisipatif yang terjadi di KWT rendah.

Dialog yang terjadi di setiap KWT memang berbeda-beda. Rata-rata anggota berdialog mengenai kegiatan Optimalisasi Pemanfaatan Pekarangan hanya pada saat pertemuan kelompok. Setiap kelompok memiliki intensitas pertemuan yang berbeda pula, ada yang hanya satu bulan sekali, 2 kali dalam sebulan hingga 4 kali dalam sebulan. Tetapi pada dasarnya seluruh KWT di Kajoran telah dilibatkan dalam diskusi sejak pada tahap sosialisasi dan perencanaan. Seluruh KWT di Kajoran menyatakan semua anggotanya datang pada saat diskusi pertama kali mengenai perencanaan kegiatan termasuk menyusun kebutuhan bibit dan polybag anggota, membentuk kelompok dan kepengurusannya, menyusun rencana kerja hingga menetapkan lokasi laboratorium lapang maupun kebun benih.

Membahas mengenai aktifitas dialog dalam komunikasi partisipatif tidak bisa dipisahkan dari adanya aspirasi dan gagasan yang disampaikan oleh partisipannya (Tuft dan Mefalopulos 2009). Rata-rata anggota mampu menyampaikan aspirasinya dengan baik pada saat pertemuan baik yang dihadiri oleh penyuluh maupun tidak. Bukan hanya anggota yang masih muda saja yang terbiasa menyuarakan aspirasinya. Di KWT Melati II setidaknya terdapat empat anggota yang berusia 60 tahun ke atas. Mereka tidak hanya sekedar datang dalam pertemuan rutin yang digelar satu kali dalam seminggu, tetapi mereka juga aktif menyampaikan aspirasi di saat diskusi berlangsung. Seperti pada saat penyuluh menawarkan untuk menambahkan komoditi buah di pekarangan dan menanyakan buah apa yang sekiranya cocok di tanam, justru merekalah yang menyampaikan ide untuk menanam buah pisang dengan jenis tertentu yang menurut pengalaman mereka lebih bisa dibudidayakan di pekarangan. Hal tersebut membuktikan bahwa aspirasi dalam kelompok bukan hanya didominasi oleh mereka yang masih muda saja, tetapi anggota yang sudah lansia masih tetap semangat karena diberikan kesempatan untuk bergabung dan menyuarakan pendapatnya. Hal tersebut diperkuat oleh penelitian Chitnis (2005) yang menyatakan bahwa adanya kesempatan dan kepercayaan yang

diberikan kepada seluruh anggota kelompok, akan memicu anggotanya untuk lebih percaya diri dalam mengungkapkan apa yang dirasakannya.

Salah satu indikator yang menunjukkan tingginya komunikasi partisipatif dan keberlanjutan program adalah adanya tindakan kolektif sebagai refleksi dari aksi partisipasi KWT (Chitnis 2005). Bentuk refleksi dari aksi partisipasi KWT diantaranya adalah mendirikan kebun bibit ataupun laboratorium lapang serta membantu membentuk kebun sekolah di sekolah yang berlokasi sama dengan KWT. Kegiatan tersebut setidaknya menjadi tolak ukur akan keberlanjutan kegiatan Optimalisasi Pemanfaatan Pekarangan di Kecamatan Kajoran. Di mana bila anggota KWT masih semangat melakukan peremajaan dan perawatan di laboratorium lapang maupun kebun bibit maka bisa dipastikan aktivitas kelompok masih tinggi dan partisipasi anggotanya tidak terputus pada saat tahapan pelaksanaan.

Pada pelaksanaan perawatan tanaman laboratorium disusun secara bergiliran dengan membentuk jadwal piket. Berdasarkan pengamatan di lapangan hampir separuh dari KWT masih menjalankan jadwal piket, kalupun ada anggota yang tidak bisa datang bisa diganti dengan jadwal anggota yang lain. Di beberapa KWT bahkan ada yang menetapkan sistem denda bagi anggota yang tidak menghadiri jadwal piket. Sistem tersebut dipahami dengan baik oleh anggota, sehingga tertanam pemikiran lebih baik piket dan merawat tanaman dengan baik daripada harus membayar denda.

Partisipasi ditunjukkan oleh ibu-ibu rumah tangga tersebut terkadang mengundang perhatian dari anggota keluarga yang lain. Anggota keluarga yang lain terutama bapak-bapak otomatis akan membantu ketika ibu-ibu mulai membuat anjang-anjang ataupun rak bersusun untuk menggantikan rak yang sudah mulai lapuk. bapak-bapak merasa senang dengan adanya kegiatan Optimalisasi Pemanfaatan Pekarangan yang tengah dijalankan oleh ibu-ibu, karena selain mampu menghemat pengeluaran belanja sayuran, pekarangan mereka sekarang jauh lebih asri sehingga dengan senang hati mereka mau membantu.

Keberhasilan komunikasi partisipatif di Kecamatan Kajoran tidak hanya ditentukan oleh keaktifan anggota KWT dalam berdialog, menyuarakan aspirasi dan merefleksikan aksinya dalam tindakan kolektif, tetapi juga penggunaan alat komunikasi yang berupa diskusi kelompok dan video. Bessete (2007) sendiri mengatakan bahwa setidaknya ada beberapa alat komunikasi yang bisa digunakan sebagai pendekatan partisipatif yaitu diskusi kelompok, drama teater partisipatif, radio, sekolah lapang, video, foto, poster hingga brosur.

Video yang diputar pada waktu sosialisasi merupakan dokumentasi kegiatan Optimalisasi Lahan pekarangan di daerah lain yang telah berhasil di luar Kabupaten Magelang. Pemutaran video tersebut mampu menarik minat masyarakat untuk melaksanakan kegiatan pemanfaatan pekarangan. Seiring berjalannya waktu KWT pelaksana kegiatan pemanfaatan pekarangan di Kajoran juga mulai menunjukkan keberhasilannya. Keberhasilan KWT tersebut mengundang perhatian dari pihak pemrakasa program P2KP yaitu Badan Ketahanan Pangan untuk membuat video dokumentasi mengenai kegiatan dan keberhasilan KWT, terutama KWT Melati II dalam melaksanakan kegiatan pemanfaatan pekarangan. Semenjak itu, video KWT Melati II menjadi alat komunikasi yang diputar untuk mensosialisasikan program optimalisasi pemanfaatan lahan pekarangan. Video tersebut bisa dikatakan berhasil menarik perhatian

warga Kecamatan Kajoran lainnya. Di samping memunculkan rasa bangga pada KWT Melati II yang menjadi pemain utama., Ibu rumah tangga di desa lain yang menyaksikan video tersebut merasa sangat tertarik untuk mengikuti program pemanfaatan lahan pekarangan, karena melihat tetangga desanya telah berhasil dan mereka juga yang menjadi pemeran utama dalam video. Keterlibatan sasaran program dalam pembuatan video pesan pembangunan mampu membuat pesan tersebut lebih mudah diterima oleh penerima sasaran karena sesuai dengan latarbelakang lingkungannya, dan para aktor di dalamnya merupakan orang yang familier dengan penerima sasaran, sehingga pesan menjadi lebih mudah untuk direspon (White dan Patel 2004).

Alat komunikasi yang digunakan selain video adalah dengan diskusi kelompok, hal tersebut dilakukan untuk menggali informasi dan masalah yang tengah terjadi dalam lingkungan kelompok (Bessete 2007). Penelitian yang dilakukan oleh Hadiyanto (2009) juga menunjukkan hasil bahwa penggabungan penggunaan alat komunikasi pertemuan kelompok dengan pemberian leaflet yang menampilkan beberapa gambar dan panduan, mampu meningkatkan pemahaman kelompok. Adanya pemutaran video dan diskusi kelompok tersebutlah yang akhirnya mampu meningkatkan pengetahuan KWT mengenai permasalahan dan solusi yang perlu dilakukan di daerahnya, sehingga memicu keaktifan anggota KWT untuk menyampaikan pendapatnya dalam berpartisipasi mengikuti kegiatan pemanfaatan pekarangan.

### 3. Hubungan antara Peran Penyuluh Pendamping dengan Komunikasi Partisipatif KWT

Keberhasilan pelaksanaan kegiatan optimalisasi lahan pekarangan di Kecamatan Kajoran tidak lepas dari peran Penyuluh Pendamping yang berasal dari PPL di kantor BPPK Kecamatan Kajoran. Peran penyuluh pendamping dalam memfasilitasi dan mengedukasi KWT, turut menghantarkan anggota KWT menjadi berani menyampaikan respon atas program pemanfaatan pekarangan yang dijalkannya. Salah satu tujuan dari artikel ini adalah untuk menganalisis hubungan antara peran penyuluh pendamping dengan komunikasi partisipatif KWT, seperti yang terlihat pada tabel 5 berikut.

Tabel 5. Koefisien korelasi (r) antara Peran Penyuluh Pendamping dengan Komunikasi Pertanian.

Peran penyuluh pendamping	Komunikasi partisipatif
	R
Peran fasilitatif	0,629*
Peran edukatif	0,579*

Keterangan : \* berhubungan nyata pada  $\alpha = 0,05$

Nilai signifikansi dari hubungan peran penyuluh pendamping yang terdiri dari peran fasilitatif dan peran edukatif dengan komunikasi partisipatif secara berurutan adalah 0,626 dan 0,579 pada selang kepercayaan 95%. Arah hubungan tercatat positif dan nyata dengan makna apabila peran penyuluh pendamping terhadap KWT besar, maka tingkat komunikasi partisipatif di KWT akan bertambah tinggi. Hal yang sama terjadi jika peran penyuluh penamping relatif kecil, maka tingkat komunikasi partisipatif KWT juga rendah.

### Kesimpulan

Setiap KWT memiliki latarbelakang yang berbeda-beda baik itu dari sumber program yang mensponsori hingga tingkat pengalaman kelompok. Luas lahan pekarangan yang dimiliki KWT di Kecamatan Kajoran tergolong sempit. hal tersebut justru membantu KWT untuk berpikir kritis dan melakukan *sharing* pengetahuan melalui diskusi kelompok untuk mencari jalan keluarnya. Berdasarkan hasil diskusi antara KWT dengan penyuluh pendamping diperoleh solusi untuk menerapkan sistem tanaman vertikal.

Pelaksanaan kegiatan pemanfaatan pekarangan tidak terlepas dari peran penyuluh yang mendampingi KWT. Peran penyuluh dalam penelitian ini dikategorikan dalam dua aspek yaitu peran fasilitatif dan peran edukatif. Peran fasilitatif yang dilakukan penyuluh pendamping di Kecamatan Kajoran tergolong cukup baik atau dalam kategori sedang berdasarkan hasil data yang di dapat di lapangan. Sementara itu peran edukatif yang selama ini dilaksanakan oleh penyuluh dalam mendampingi KWT menunjukkan pada kategori yang tinggi atau baik menurut KWT. Penyuluh dianggap mampu memfasilitasi kebutuhan KWT, baik itu kebutuhan fisik maupun kebutuhan informasi. Begitu juga dalam hal mengedukasi KWT, melalui informasi yang diberikan dan diskusi yang berlangsung selama pemberian materi serta pelatihan yang sesuai dengan kebutuhan KWT terungkap bahwa peran edukatif penyuluh layak untuk dikatakan baik menurut KWT.

Penelitian ini juga bertujuan untuk melihat korelasi antara karakteristik kelompok dan peran penyuluh pendamping dengan komunikasi partisipatif. Berdasarkan hasil penelitian diperoleh hasil bahwa terdapat hubungan positif yang sangat nyata antara karakteristik kelompok dalam hal pengalaman kelompok dengan komunikasi partisipatif yang berlangsung di KWT Kecamatan kajoran. Sementara itu dua indikator lain seperti umur kelompok dan luas lahan menunjukkan hubungan yang tidak nyata dengan komunikasi partisipatif yang berlangsung di KWT. Adapun peran penyuluh dalam hal peran fasilitatif dan peran edukatif menunjukkan hubungan yang positif dan nyata dengan komunikasi partisipatif. Hal tersebut bermakna peran penyuluh pendamping dalam memfasilitasi dan mengedukasi anggota KWT turut berkontribusi terhadap tingginya komunikasi partisipatif di KWT Kecamatan Kajoran. Sama halnya dengan pengalaman yang dimiliki oleh KWT, semakin banyak pengalaman yang dimiliki oleh kelompok, maka komunikasi partisipatif dalam kelompok tersebut akan semakin aktif.

Terdapat hal lainnya yang turut mempengaruhi keberhasilan penyuluh dalam menarik minat dan partisipasi anggota diantaranya adalah diskusi kelompok dan video yang melibatkan anggota KWT sebagai pemain utamanya. Berdasarkan hasil pengamatan di lapangan kedua hal tersebutlah yang turut memicu partisipasi aktif KWT dalam berkontribusi pada pelaksanaan Optimalisasi Pemanfaatan Pekarangan di Kecamatan Kajoran.

## **Saran**

Penelitian mengenai komunikasi partisipatif pada suatu kelompok dengan metode kuantitatif yang mengumpulkan informasi dengan menggunakan kuesioner, perlu untuk menambah informasi melalui wawancara mendalam dengan pihak-pihak yang memiliki pengetahuan lengkap mengenai kegiatan. Informasi bisa diperoleh dari anggota kelompok, pengurus kelompok, aparat dan petinggi desa, pihak penyuluh hingga informasi dari lembaga yang memprakarsai pelaksanaan program. Hal tersebut dilakukan untuk menambah informasi dan melihat masalah dari berbagai sudut pandang. Pada dasarnya komunikasi partisipatif yang terjadi di KWT Kajoran sudah berlangsung dengan sangat baik. Penyuluh dari

BPPK Kajoran hanya perlu mempertahankan ritme pendampingan yang selama ini telah dilaksanakan dan terus memberikan motivasi kepada KWT. Pemberian *reward* untuk menghargai kinerja KWT juga dipandang perlu untuk menambah semangat KWT dalam berpartisipasi pada kegiatan pemanfaatan pekarangan.

## DAFTAR PUSTAKA

- Ashari, Saptana dan T.B Purwantini. 2012. Potensi dan Prospek Pemanfaatan Lahan Pekarangan untuk Mendukung Ketahanan Pangan. Forum Penelitian Agro Ekonomi, Volume 30 Nomor 1, Juli 2012 : 13-30.
- Badan Ketahanan Pangan. 2013. Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Badan Ketahanan Pangan 2013. Kementerian Pertanian : Jakarta.
- Bassette G. 2007. *Facilitating Dialogue, Learning and Participation in Natural Resource Management. Roma : Food and Agriculture Organization of the United Nation. 9th UN Roundtable on Communication for Development. FAO : Roma.*
- Chitnis K. 2005. Communication for Empowerment and Participatory Development : A Social Model of Health in Jamkhed India. [Desertasi]. Ohio (USA) : Ohio University.
- Dewan Ketahanan Pangan. 2006. *Kebijakan Umum Ketahanan Pangan 2006-2009.* Jurnal Gizi dan Pangan. 1(1).
- Hadiyanto. 2009. Desain Pendekatan Komunikasi partisipatif dalam Pemberdayaan Peternak Domba Rakyat. Media Peternakan. Volume 32, Nomor 2: 145-154
- Kementerian Pertanian. 2011. Pedoman Umum Model Kawasan Rumah Pangan Lestari. Jakarta.
- Kusumadinata A.A. 2011. Analisis Komunikasi Partisipatif pada Pemberdayaan Masyarakat melalui Program Perbaikan Gizi: Studi Kasus Kelompok Gizi Masyarakat Pulokerto Kota Palembang. [Tesis]. Bogor (ID): Sekolah Pascasarjana Institut Pertanian Bogor.
- Mantra I.B, Kasto. 1995. Penentuan Sampel. Metode Penelitian Survei. Singarimbun M dan Efendi S, editor. Jakarta (ID) : LP3ES.
- Melkote S.R dan Vallath C. 2004. Operational Impasses In Knowledge Sharing : Case Study Examples. White, SA, Nair, KS dan Ascroft, J, editor . New Delhi (In): Sage Publications.
- Muchlis F. 2009. Analisis Komunikasi Partisipatif dalam Program Pemberdayaan Masyarakat Studi Kasus pada Implementasi Musyawarah dalam PNPM Mandiri Perdesaan di Desa Teluk Kecamatan Pemayang Kabupaten Batang Hari. [Tesis] Bogor (ID) : Institut Pertanian Bogor.
- Mulyasari G. Komunikasi Partisipatif Warga pada Bengkulu Regional Development Project : Kasus di Desa Pondok Kubang Kecamatan Pondok Kelapa Kabupaten Bengkulu Tengah.[Thesis].Bogor (ID):Sekolah Pascasarjana Institut Pertanian. Bogor.
- Nair KS dan White SA . 2004. *Participatory Communication Working for Change and Development.* White, SA, Nair, KS dan Ascroft, J, editor . New Delhi (In): Sage Publications

- Prasetyani I dan Widiyanto D. 2013. Strategi Menghadapi Ketahanan Pangan (dilihat dari ketersediaan pangan) Penduduk Indonesia di Masa Mendatang (Tahun 2015-2040). Jurnal Bumi Indonesia. Volume 2, Nomor 2. 227-235.
- Rahayu, M dan Prawiroatmodjo, S. 2005. Keanekaragaman Tanaman Pekarangan dan Pemanfaatannya di desa Lampeapi, Pulau Wawoni Sulawesi tenggara. Jurnal Teknik Lingkungan P3TL-BPPT. Volume 6, Nomor 2. 360-364.
- Sajogyo. 1994. Menuju Gizi Baik yang Merata Pedesaan dan di Kota. Gajah Mada Press. Yogyakarta.
- Saptana, TB. Purwantini, Y. Supriyatna, Ashari, A.M. Ar-Razy, T. Nurasa, S. Suharyono, I. W. Rusastra, S.H Susilowati dan J. Situmorang. 2011. Dampak Pengembangan Model Kawasan Rumah Pangan Lestari Terhadap Kesejahteraan Rumah Tangga dan Ekonomi Pedesaan. Laporan Penelitian Pusat Sosial ekonomi dan Kebijakan Pertanian. Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian.
- Saputra Y. 2011. Faktor-Faktor yang Berhubungan dengan Perilaku Komunikasi Partisipatif Fasilitator. [Tesis]. Bogor (ID) : Institut Pertanian Bogor.
- Satriani I. 2011. Komunikasi Partisipatif pada Program Pos Pemberdayaan Keluarga : Studi Kasus di RW 05 Kelurahan Situgede Kecamatan Bogor Barat. [Tesis].Bogor (ID):Sekolah Pascasarjana Institut Pertanian Bogor.
- Singarimbun M. 1995. *Metode dan Proses Penelitian*. Singarimbun M dan Effendi S, editor. Jakarta (ID):LP3ES.
- Sulistiyawati F, Setyowati Y, Wuryanto T. 2005. *Komunikasi Pemberdayaan*.Yogyakarta(ID): APMD press.
- Tufte T dan Mefalopulos P. 2009. *Participatory Communication A Practical Guide*. Washington, D.C (US) : The World Bank.
- Waisbord S. 2008. The Institutional Challenges of Participatory Communication in International Aid. Social Identities. Volume 14,Nomor 4: 505-522.
- Warnock K, Schoemaker E, Wilson M. 2007. *The Case for Communication in Sustainable Development*. London (UK) : Panos London.
- Werdhany, W.I dan Gunawan. 2012. Teknik Pengembangan Kawasan Rumah Pangan Lestari di Daerah Istimewa Yogyakarta. Jurnal Ilmu-ilmu Pertanian. Volume 16, Nomor 2.76-83.
- White, S.A dan Patel, P.K. 2004. Participatory Message Making with Video : Revelations from Studies in India and the USA. White, SA, Nair, KS dan Ascroft, J, editor . New Delhi (In): Sage Publications.
- Zypchyn, K. 2012. Getting Back to the Garden: Reflections on gendered behaviours in home gardening. Earth Common Journal. Volume 2, Nomor 1.